KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Kinerja DPR harus membaik. Kenaikan Anggaran merusak kredibilitas
**Tanggal** : Selasa, 10 Desember 2013
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 4

# Kinerja DPR Harus Membaik

## Kenaikan Anggaran Merusak Kredibilitas

**JAKARTA, KOMPAS — Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan meningkat menyusul kenaikan anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat pada tahun 2014. Pasalnya, dengan kenaikan anggaran itu, frekuensi anggota DPR untuk menyerap aspirasi pun bertambah.**

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, M Arwani Thomafi, Senin (9/12), mengakui, anggaran penyerapan aspirasi masyarakat pada tahun 2014 naik. Namun, bukan berarti dana yang diberikan untuk tiap- tiap anggota DPR pada setiap kunjungan kerja meningkat.

Kenaikan anggaran terjadi karena ada penambahan frekuensi kunjungan anggota DPR untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil). Jika sebelumnya hanya lima kali dalam satu tahun, tahun 2014 bertambah menjadi tujuh kali.

Penambahan frekuensi kunjungan tersebut disepakati lantaran banyak anggota DPR yang berasal dari dapil dengan cakupan wilayah yang relatif luas, terutama dapil-dapil di luar Jawa yang mencakup pulau-pulau kecil.

Anggaran yang dialokasikan untuk kunjungan DPR ke dapil pada tahun ini sebesar Rp 150 juta. "Anggaran Rp 150 juta itu untuk satu kali penyerapan aspirasi, ditambah dengan transportasi sekitar Rp 30 juta," kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa.

Menurut dia, dalam satu tahun, anggota DPR melakukan penyerapan aspirasi pada waktu reses sebanyak empat kali, ditambah dengan kunjungan dapil sebanyak enam kali. Tiap-tiap kunjungan ke dapil, satu anggota DPR memperoleh biaya Rp 50 juta ditambah biaya transportasi dan akomodasi sekitar Rp 20 juta.

Pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, secara terpisah, di Jakarta, mengatakan, menaikkan anggaran reses menjelang pemilu bisa dipastikan akan semakin merusak kredibilitas DPR. Sebab, politisasi anggaran reses sulit dihindari. Apalagi tidak ada akuntabilitas dan batasan jelas dalam penggunaan reses. (NTA/INA/ATO)